

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kronologi terjadinya pencemaran air akibat KJA di Danau Maninjau dimulai dengan adanya program Minapolitan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang dilaksanakan di Kabupaten Agam, Program ini telah menetapkan kawasan Danau Maninjau sebagai kawasan inti untuk kegiatan budidaya perikanan dengan target produksi 272.670 ton/tahun. Sebenarnya Pengembangan kegiatan budi daya perikanan KJA sudah ada sejak tahun 1992 namun dengan adanya program tersebut, sebagian masyarakat beralih usaha ke usaha keramba baik sebagai pemilik maupun pekerja. Hal ini disebabkan karena besarnya daya tarik keuntungan ekonomi yang diperoleh baik dari segi besaran keuntungan maupun waktu, hal tersebut membuat jumlah KJA semakin tahun mengalami peningkatan dan puncaknya pada tahun 2016 mencapai 17.226 petak. Peningkatan jumlah KJA di Danau Maninjau menjadikan kegiatan KJA tersebut memberikan kontribusi beban pencemaran terbesar terhadap Danau Maninjau yaitu sebesar 95,37%. Fakta ini juga dibuktikan dengan keadaan Danau Maninjau sudah mencapai hipereutropik atau tercemar berat dan 95-97% dalam kondisi tanpa oksigen (anoksik).
2. Upaya penanggulangan pencemaran air di Danau Maninjau yang dilakukan oleh pelaku usaha KJA tepatnya pengusaha KJA yaitu berupa pembersihan Danau Maninjau dari sampah, bangkai ikan, sisa KJA yang telah rusak dan tidak beroperasi lagi. Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan

Pasal 53 ayat (2) UU PPLH. Kegiatan penanggulangan pencemaran air di Danau Maninjau yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam antara lain adalah berupa pemberian informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat, kegiatan tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PPLH. Berdasarkan pasal 53 UU PPLH, penanggulangan merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan pelaku usaha bukan pada dinas. Yang utama melakukan penanggulangan terlebih dahulu dilakukan oleh pelaku usaha, bisa saja jika Dinas melakukan penanggulangan namun secara keseluruhan dengan biaya dibebankan pada pelaku usaha.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penanggulangan Pencemaran air akibat KJA di Danau Maninjau yaitu tidak adanya regulasi Zonasi Perairan Danau Maninjau. Regulasi Zonasi Perairan Danau Maninjau merupakan peraturan terkait dengan pemanfaatan ruang mana untuk pariwisata, konservasi, perikanan pada danau. Jadi regulasi yang dimaksud diatas adalah zonasi tata ruang danau. Hambatan-hambatan lain yaitu berupa transformasi ekonomi dan keterbatasan anggaran dan Cara Mengatasinya dengan mendorong percepatan penyusunan regulasi, pengalihan mata pencaharian, meminta bantuan dan dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian terkait.

B. Saran

1. Dengan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur Zonasi Perairan Danau Maninjau, maka tidak ada sanksi yang mengikat dengan tegas. Hingga aturan ini sangat diperlukan agar tidak ada lagi kegiatan KJA yang tidak memiliki izin usaha perikanan, berada pada zona KJA serta serta menerapkan teknologi budidaya yang baik atau musim tebar yang sesuai.
2. Perlunya sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau
3. Perlunya sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat terkait kondisi Danau Maninjau, sehingga masyarakat mengetahui kondisi serta lebih peduli terhadap Danau Maninjau.
4. Perlunya sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat mengenai KJA yang merupakan penyumbang pencemaran terbesar di Danau Maninjau serta dampak yang ditimbulkan hingga berpengaruh pada transformasi ekonomi.
5. Pembentukan Komunitas Peduli Lingkungan dengan melibatkan peran nagari dan Ninik Mamak
6. Masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya harus didorong agar berpartisipasi secara sungguh-sungguh dalam mengenali dan menyelesaikan masalah pencemaran Danau Maninjau.